
**PRODUKSI INSEKURITAS DALAM KERANGKA KEAMANAN
MANUSIA: KETIMPANGAN STRUKTURAL DAN
PERSISTENSI ANCAMAN DI
AFRIKA SELATAN**

Selvi Julianti¹, Fajar Imam Zarkasyi²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

e-mail: ¹2210631260015@student.unsika.ac.id, ²Fajar.zarkasyi@fisip.unsika.ac.id

Abstract: South Africa has created a variety of legal frameworks and protection institutions but threats to personal security remain. Previous research has been on poverty, unemployment and policy effectiveness. But they haven't adequately explained how unequal access to protection translates into insecurity. The purpose of this study is to analyse how structural inequality and unequal access to protection creates insecurity within the human security framework in South Africa. The present research employs a qualitative methodology, employing the concept of human security to analyse threats to personal security and the concept of structural violence to understand how social inequalities produce differential capacities for protection in society. The findings suggest that insecurity is not just a consequence of individual criminal acts but is structurally produced by inequalities in access to resources and protection. The findings also suggest that human security is not only a function of the existence of protective institutions, but of the distribution of access to such protection.

Keywords: Human Security, Structural Violence, Insecurity, South Africa

Abstrak: Afrika Selatan telah menciptakan berbagai kerangka hukum dan lembaga perlindungan, namun ancaman terhadap keamanan personal tetap ada. Penelitian sebelumnya berfokus pada kemiskinan, pengangguran, dan efektivitas kebijakan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana akses yang tidak merata terhadap perlindungan berujung pada ketidakamanan. Tujuan studi ini adalah menganalisis bagaimana ketidaksetaraan struktural dan akses yang tidak merata terhadap perlindungan menimbulkan ketidakamanan dalam kerangka keamanan manusia di Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan memanfaatkan konsep keamanan manusia untuk menganalisis ancaman terhadap keamanan personal serta konsep kekerasan struktural untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan sosial menghasilkan kapasitas perlindungan yang berbeda-beda di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakamanan bukan hanya konsekuensi dari tindakan kriminal individu, melainkan dihasilkan secara struktural oleh ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa keamanan manusia tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga perlindungan, tetapi juga pada distribusi akses terhadap perlindungan tersebut.

Kata kunci: Keamanan Manusia, Kekerasan Struktural, Ketidakamanan, Afrika Selatan.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat kontemporer, kekerasan tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, tetapi juga sebagai bagian dari ancaman yang lebih luas terhadap

keamanan manusia (UNDP, 1994a). Oleh karena itu, perhatian tidak hanya diarahkan pada keberadaan kekerasan itu sendiri, melainkan juga pada kondisi yang membuat individu terus terekspos terhadap ancaman serta kemampuan sistem sosial dalam memberikan

perlindungan yang efektif (UNDP, 2014). Tingginya prevalensi kekerasan secara global menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan individu masih berlangsung secara terus-menerus dan bersifat persisten (WHO, 2024b). Fenomena ini bahkan terjadi di negara-negara yang telah memiliki beragam kebijakan, regulasi, dan kerangka normatif yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan.

Dalam perspektif *human security* khususnya dimensi *personal security*, kekerasan dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan dalam menjamin perlindungan individu dari ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikologis. Data WHO menunjukkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (WHO, 2024a). Angka itu menunjukkan jika kekerasan tidak hanya sekadar sebuah kejadian yang bersifat sporadis. Namun juga sebuah risiko yang luas serta terus berulang sejumlah konteks kehidupan. Variasi bentuk kekerasan mulai dari fisik dan seksual hingga psikologis maupun ekonomi juga memperlihatkan jika ancaman pada keamanan individu hadir di dalam sejumlah dimensi (UNHCR, 2026). Maka kekerasan bukan sekadar menjadi sebuah masalah sosial namun pula menggambarkan situasi insekuritas yang masih harus dialami oleh beberapa bagian masyarakat secara berkelanjutan.

Data dari UN Women menunjukkan bahwa kekerasan di Afrika Selatan masih relatif tinggi dan mengalami *underreporting* yang cukup signifikan karena rendahnya kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum serta persepsi terkait lemahnya mekanisme perlindungan institusional bagi korban kasus kekerasan. Akibatnya banyak korban yang enggan melapor karena penegak hukum dinilai tidak sensitif terhadap kasus kekerasan dan bahwa penanganan hukum sering kali tidak efektif (UN Women, 2023). Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif

negara terhadap perlindungan dengan realitas domestik yang masih dihadapi masyarakat

Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang aktif berkomitmen terhadap berbagai kerangka norma internasional termasuk *Beijing Platform for Action* (BPfA) yang diadopsi pada *Fourth World Conference on Women* tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995 (United Nations, 1995). Sebagai agenda global yang telah disepakati oleh 189 negara dalam mendorong penghapusan berbagai hambatan terhadap kesetaraan secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi hingga politik (UN Sustainable Development Group, 2025). BPfA mengidentifikasi 12 *critical areas of concern* yang menjadi dasar penyusunan kerangka kebijakan bagi negara dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesetaraan di tingkat global.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut Afrika Selatan telah mengembangkan sejumlah instrumen hukum dan kelembagaan yang bertujuan memperkuat perlindungan dari ancaman kekerasan. Beberapa regulasi yang menjadi landasan meliputi *Domestic Violence Act 116 of 1998*, *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act* serta reformasi hukum terbaru. Hal itu dilakukan melalui *Domestic Violence Amendment Act 14 of 2021*, *Criminal and Related Matters Amendment Act 12 of 2021* dan *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act 13 of 2021* yang mulai diimplementasikan sejak 2022 (The DoJ & CD, 2022). Berbagai regulasi tersebut dirancang untuk memperluas perlindungan korban dan memperkuat mekanisme *protection order*. Selain itu regulasi juga dibentuk guna meningkatkan akses terhadap keadilan serta mengakui bentuk-bentuk kekerasan yang semakin berkembang termasuk kekerasan berbasis teknologi.

Meskipun kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa negara berkomitmen dalam memperkuat *personal security*.

Tingkat kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menghilangkan ancaman terhadap keamanan individu. Karena posisinya di struktur sosial maka perempuan sebagai korban yang lebih rentan dan terdampak. Hal itu menempatkan mereka pada tingkat eksposur risiko yang lebih tinggi serta akses perlindungan yang lebih rendah. Menurut *Statistics South Africa* (Stats SA) dalam laporan *Women Empowerment Gender Series Volume IX: 2017-2022* menyoroti bagaimana status ekonomi memengaruhi kemampuan perempuan untuk keluar dari hubungan yang *abusive* (Statistics South Africa, 2022). Laporan dari *Human Sciences Research Council* (HSRC) memperlihatkan jika 1 dari 8 perempuan di Afrika Selatan mengalami kekerasan ekonomi seperti adanya perampasan pada sumber daya finansial atau bahkan larangan untuk bekerja (HSRC, 2025). Temuan itu menegaskan jika kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial bukan sekadar sebuah situasi biasa namun pula menjadi bagian dari mekanisme struktural yang memperkuat kerentanan dari perempuan terhadap kekerasan di Afrika Selatan. Maka penelitian ini menggeser fokus analisis dari penerapan kebijakan menuju mekanisme produksi insekuritas di dalam kerangka kerja *human security*. Penggunaan konsep tersebut khususnya pada dimensi *personal security* berguna untuk menelaah tentang bagaimana ancaman terhadap keamanan individu diproduksi melalui distribusi risiko dan akses kapasitas perlindungan yang tidak merata. Sementara itu konsep *structural violence* digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi sosial-ekonomi berfungsi sebagai mekanisme produksi risiko.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana keterbatasan kapasitas perlindungan

negara berkontribusi terhadap tetap tingginya eksposur individu terhadap berbagai ancaman. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data serta konteks yang melingkupinya (Creswell & Creswell, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder. Contohnya seperti laporan organisasi internasional, termasuk UN Women dan World Bank. Selain itu terdapat juga data dari United Nations serta dokumen kebijakan pemerintah Afrika Selatan hingga artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data dan penyajian data. Setelah itu dilakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Melalui pendekatan tersebut penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara keterbatasan kapasitas perlindungan negara dan kerentanan individu terhadap kekerasan di Afrika Selatan. Khususnya jika dilihat dari dimensi *personal security* dalam kerangka *human security*.

Konsep Structural Violence Johan Galtung

Perspektif Johan Galtung mengenai kekerasan struktural memberikan dasar analitis untuk memahami bagaimana struktur sosial dapat menciptakan ancaman terhadap keamanan individu. Galtung (1969) menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi juga bekerja melalui struktur sosial, politik, dan ekonomi yang membatasi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam pengertian ini, kekerasan tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau insidental, melainkan sebagai kondisi yang lahir dari

ketimpangan dalam struktur sosial. Dalam perspektif keamanan manusia, khususnya dimensi *personal security*, konsep kekerasan struktural dapat direposisi sebagai mekanisme produksi risiko. Struktur sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya tidak hanya menciptakan kerentanan, tetapi juga membentuk pola distribusi risiko yang tidak merata di dalam masyarakat. Akibatnya, individu yang berada dalam kondisi tersebut cenderung menghadapi paparan risiko yang lebih tinggi dan berulang terhadap situasi yang tidak aman.

Di Afrika Selatan kondisi ekonomi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan ekonomi hingga akses yang terbatas terhadap perlindungan sosial menciptakan jalur-jalur yang memperpanjang paparan terhadap ancaman. Namun keterbatasan kemampuan individu untuk menghindari atau melarikan diri dari situasi berisiko tinggi menunjukkan bahwa ketidakamanan tidak hanya ditimbulkan oleh tindakan langsung. Namun pula oleh struktur-struktur yang membatasi pilihan dan memperkuat paparan terhadap ancaman.

Human Security

Konsep *human security* diperkenalkan dalam *Human Development Report* UNDP tahun 1994 sebagai pendekatan keamanan yang berpusat pada individu (*people-centred security*). Berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang menitikberatkan pada perlindungan negara dari ancaman militer, *human security* berfokus pada perlindungan manusia dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan, kesejahteraan, dan martabat mereka. UNDP mengidentifikasi tujuh dimensi utama *human security*, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security* (UNDP, 1994a).

Salah satu dimensi terpenting dari masalah kekerasan adalah *personal security*. *Personal security* berarti perlindungan individu dari berbagai bentuk ancaman fisik dan psikologis serta kekerasan yang dilakukan oleh negara dan kelompok sosial atau individu lain. Keamanan dalam konteks ini bukan hanya berarti tidak adanya konflik bersenjata. Namun pula berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk hidup bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) (UNDP, 1994b). Segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan struktural dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan pribadi. Hal itu dikarenakan dinilai telah mengancam keselamatan, integritas fisik dan nyawa seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan dan Reformasi Kerangka Perlindungan di Afrika Selatan

Afrika Selatan telah mengembangkan berbagai kerangka perlindungan yang merujuk pada *Beijing Platform for Action* (BPfA). Sebuah agenda global yang mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan perlindungan individu ke dalam kebijakan nasional. Hal itu dilakukan dengan 12 *critical areas of concern* sebagai fokus utamanya (United Nations, 1995). Dalam implementasinya pemerintah Afrika Selatan juga merujuk pada *Beijing +30 Report*. Report itu mencatat sejumlah regulasi penting yang telah dibentuk. Contohnya seperti *Domestic Violence Act* (1998) yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban kekerasan domestik. Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan fisik dan seksual. Selain itu terdapat juga kekerasan seperti emosional serta verbal. Kekerasan seperti psikologis hingga ekonomi juga termasuk di dalamnya. Perlindungan itu dapat memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan *protection*

order terhadap pelaku kekerasan (Government Gazette, 2022). *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act* (2007) memperluas definisi kekerasan seksual sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban. Termasuk hak untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan selama proses hukum berlangsung (South African Government, 2007). *National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide/ NSP-GBVF* (2020–2030) disusun sebagai kerangka nasional yang komprehensif untuk menangani kekerasan berbasis gender dan femisida. Penyusunan itu dilakukan melalui berbagai pendekatan mulai dari pencegahan dan penguatan sistem peradilan hingga penyediaan layanan bagi korban. Selain itu terdapat pula pencegahan seperti pemberdayaan ekonomi perempuan hingga perubahan norma sosial yang patriarkal (South African Government, 2020). Selain itu pemerintah juga membentuk *National Council on Gender-Based Violence and Femicide* (NCGBVF) sebagai lembaga koordinasi nasional. Lembaga ini bertugas memastikan implementasi kebijakan berjalan secara lintas sektor dan melibatkan pemerintah. Selain itu lembaga tersebut juga harus melibatkan aparat penegak hukum serta masyarakat sipil.

Berbagai regulasi, institusi dan mekanisme perlindungan yang ada menunjukkan bahwa Afrika Selatan telah membangun kerangka perlindungan melalui kombinasi komitmen internasional dan kebijakan domestik. Upaya ini pada dasarnya mencerminkan keinginan negara untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan merespons berbagai bentuk ketimpangan struktural. Namun demikian keberadaan kerangka hukum dan institusi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan signifikan terhadap ancaman yang dihadapi individu. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor struktural yang membuat sebagian kelompok masyarakat tetap

rentan terhadap ancaman. Walaupun berada dalam sistem perlindungan yang sama. Pertanyaan tersebut menjadi titik fokus penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana kondisi insecurities tetap bertahan melalui distribusi akses terhadap perlindungan yang tidak merata dalam kerangka *human security*.

Persistensi Ketimpangan Struktural

Di Afrika Selatan persoalan insecurities tetap ada meskipun negara tersebut telah mengembangkan berbagai regulasi, institusi dan mekanisme perlindungan pasca-apartheid. Dalam perspektif *structural violence* Johan Galtung kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh kurangnya perlindungan atau kebijakan yang diskriminatif secara langsung. *Structural violence* merujuk pada susunan sosial yang secara sistematis menghasilkan peluang hidup dan akses terhadap sumber daya. Selain itu terdapat pula tingkat keamanan yang berbeda di antara kelompok masyarakat (Galtung, 1969). Oleh karena itu keberadaan hukum dan institusi perlindungan tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan apabila struktur sosial yang mendistribusikan akses terhadap sumber daya dan perlindungan masih tetap ada dan bertahan.

Berdasarkan data Statistics South Africa (Stats SA) dalam *Poverty Trends in South Africa*, tingkat pengangguran di Afrika Selatan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dari 24,7% pada tahun 2004 menjadi 32,4% pada tahun 2023 dengan sekitar 7,9 juta orang tercatat sebagai penganggur. Angka ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam penyerapan tenaga kerja serta distribusi kesempatan ekonomi di negara tersebut (Statistics South Africa, 2025b). Temuan serupa juga terlihat dalam *Quarterly Labour Force Survey*, yang mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2024 tingkat pengangguran mencapai 32,9% dengan jumlah penganggur meningkat menjadi sekitar 8,2 juta orang dalam angkatan kerja.

Ketimpangan ekonomi di Afrika Selatan juga dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan yang masih bertahan dalam struktur masyarakat. Berdasarkan laporan *National Poverty Lines* jumlah penduduk yang hidup di bawah *Lower-Bound Poverty Line* (LBPL) sebesar R1 109 per orang per bulan. Sementara yang berada di bawah *Upper-Bound Poverty Line* (UBPL) mencapai R1 634 per orang per bulan (Statistics South Africa, 2024a). Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi berada dalam kondisi miskin atau rentan miskin sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat terbatas dan mudah terdampak oleh perubahan ekonomi sekecil apa pun. Selain itu laporan World Bank juga mencatat bahwa ketimpangan pendapatan di Afrika Selatan termasuk yang tertinggi di dunia dengan *Gini coefficient* sekitar 0,63–0,67 (World Bank, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa distribusi pendapatan masih sangat timpang yang pada akhirnya turut membentuk struktur sosial di mana akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Selain itu terdapat pula ketimpangan pada mobilitas sosial sangat dipengaruhi oleh posisi awal seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi.

Selain itu struktur spasial yang terbentuk pada masa apartheid masih meninggalkan dampak yang cukup kuat hingga saat ini. Melalui sistem *homelands* dan *townships* mayoritas penduduk kulit hitam pada masa itu dipisahkan dari pusat-pusat ekonomi dan ditempatkan di wilayah yang relatif terpinggirkan (Sulla & Zikhali, 2018). Walaupun segregasi rasial secara formal telah dihapus sejak 1994 namun pola permukiman tersebut tetap bertahan dan masih memengaruhi akses masyarakat terhadap pekerjaan dan pendidikan. Selain itu pola tersebut juga berpengaruh pada transportasi serta layanan publik (Manysheva et al., 2025). *International Monetary Fund* (IMF) Laporan *International Monetary Fund* (IMF) juga menegaskan bahwa ketimpangan di Afrika Selatan masih sangat dipengaruhi oleh perbedaan

geografis dan rasial yang berakar dari era apartheid. Hal itu dapat dilihat ketika kelompok kulit hitam secara sistematis dibatasi aksesnya terhadap pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak. Hal itu berdampak pada pembatasan infrastruktur dan aset produktif (Meleshchuk & Schauer, 2026). Kondisi ini pada akhirnya membentuk kelompok masyarakat yang memiliki peluang ekonomi dan kapasitas perlindungan yang lebih terbatas dibandingkan kelompok lainnya.

Ketimpangan di Afrika Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur spasial tetapi juga oleh distribusi sumber daya ekonomi yang masih belum merata. Negara ini masih tercatat sebagai salah satu dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia dengan koefisien Gini sekitar 0,65 (Meleshchuk & Schauer, 2026). Meskipun berbagai kebijakan redistributif tersebut telah diterapkan sejak masa transisi demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap aset produktif dan peluang ekonomi hingga pendapatan masih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Meleshchuk & Schauer, 2026; Sulla et al., 2022). Akibatnya tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan peluang yang tersedia. Perbedaan ini juga berdampak pada kemampuan individu dalam memperoleh keamanan ekonomi dan mengakses layanan yang berkualitas. Selain itu juga berpengaruh pada cara seseorang dalam menghadapi berbagai risiko sosial yang pada akhirnya tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat.

Ketimpangan ini menjadi penting dalam perspektif *structural violence* karena berpengaruh langsung pada kemampuan individu dalam mengakses berbagai bentuk perlindungan yang disediakan negara. Kelompok yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi maupun geografis yang kurang menguntungkan umumnya memiliki keterbatasan dalam menjangkau mekanisme perlindungan yang tersedia. Walaupun secara formal

mereka berada dalam sistem hukum dan institusi yang sama. Sebaliknya kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya cenderung lebih mampu untuk mengantisipasi, menghindari dan merespons berbagai bentuk ancaman. Dengan demikian maka insekuritas tidak hanya muncul dari keberadaan ancaman itu sendiri. Namun pula dari ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan perlindungan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor seperti kemiskinan dan pengangguran atau tingginya tingkat kriminalitas tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa insekuritas terus bertahan di Afrika Selatan.

Human Security: Personal Security dan Persistensi Ancaman Kekerasan di Afrika Selatan

Dari perspektif keamanan manusia menurut Sabina Alkire (2003) suatu situasi menjadi masalah keamanan ketika ancaman yang dihadapi individu bersifat kritis dan meluas. Ancaman-ancaman ini melibatkan tindakan yang membahayakan nyawa mereka dan terjadi berulang kali dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hubungan antara ketidaksetaraan dan *personal security* terletak pada bagaimana ketidaksetaraan menciptakan kesenjangan dalam kapasitas perlindungan di antara individu bukan sekadar pada keberadaan ketidaksetaraan itu sendiri. Individu yang memiliki akses ke pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang memadai serta yang juga memiliki tempat tinggal yang aman dan terjamin lebih mampu menghindari berbagai bentuk ancaman. Sebaliknya individu yang hidup dalam kemiskinan dan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perlindungan cenderung memiliki sedikit pilihan untuk melindungi diri dari ancaman potensial. Dengan demikian hubungan ini menunjukkan bahwa *personal security* tidak hanya ditentukan oleh kapasitas negara untuk memberikan perlindungan formal tetapi juga oleh kemampuan individu untuk mengakses sumber daya

yang memungkinkan mereka mengurangi paparan terhadap ancaman sehari-hari.

Ketimpangan dalam kapasitas perlindungan ini kemudian menciptakan distribusi risiko yang tidak merata di dalam masyarakat. Dalam kerangka kerja kekerasan struktural Johan Galtung (1969) ancaman tidak dialami secara setara karena struktur sosial menempatkan sebagian individu pada posisi yang lebih dekat dengan sumber risiko dibandingkan yang lain. Dengan demikian paparan terhadap kekerasan tidak semata-mata ditentukan oleh identitas seseorang. Melainkan posisi sosioekonomi mereka lah yang menentukan paparan mereka terhadap kekerasan. Studi di Afrika Selatan menunjukkan bahwa kejahatan dan kekerasan lebih terkonsentrasi di daerah miskin dan wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi. Selain itu kejahatan dan kekerasan juga cenderung terjadi di permukiman informal yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur keamanan, transportasi dan layanan publik. Dalam kondisi seperti itu individu yang tinggal di lingkungan tersebut lebih rentan terhadap ancaman terhadap keselamatan fisik mereka. Hal ini sangat kontras dengan mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih aman dan terlindungi.

Perempuan termasuk di antara kelompok yang paling sering menjadi sasaran ancaman terhadap keamanan pribadi mereka. Hal ini bukan karena identitas gender itu sendiri secara otomatis menciptakan kerentanan. Melainkan karena perempuan lebih sering berada dalam posisi struktural dengan kapasitas perlindungan yang lebih rendah. Data dari Statistics South Africa menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 42,4% rumah tangga di Afrika Selatan dipimpin oleh perempuan atau *female-headed households*. Proporsi ini jauh lebih tinggi di daerah pedesaan yang secara umum mempunyai tingkat kemiskinan tinggi. Proporsi ini juga terlihat pada daerah dengan layanan publik yang lebih besa jika dibandingkan

dari pusat ekonomi lainnya (Statistics South Africa, 2025c). Sejumlah kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan tidak hanya memikul tanggung jawab ekonomi rumah tangga. Tetapi juga lebih sering menghadapi situasi yang ditandai dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan kelembagaan. Ketika ancaman muncul maka kemampuan mereka untuk pindah tempat tinggal dan mengakses perlindungan hukum menjadi lebih terbatas. Mereka juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menggunakan transportasi yang aman atau memperoleh bantuan ekonomi dibandingkan dengan individu yang memiliki sumber daya lebih besar.

Posisi struktural ini diperkuat oleh kondisi pasar tenaga kerja yang terus menunjukkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan yang stabil dan terlindungi. Menurut Badan Statistik Afrika Selatan pada kuartal kedua tahun 2025 terdapat sekitar 2 juta perempuan atau 27.2% angkatan kerja perempuan yang terlibat dalam pekerjaan informal. Mereka tercatat bergabung tanpa perlindungan seperti kontrak kerja dan asuransi kesehatan. Mereka juga tidak terlindungi oleh dana pensiun. Selain itu sekitar 2.1 juta perempuan berada di luar angkatan kerja karena tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan (Statistics South Africa, 2025a). Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan lebih bergantung pada sumber pendapatan lain atau anggota rumah tangga lainnya. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menghindari lingkungan yang tidak aman atau melarikan diri dari situasi yang mengancam. Di sisi lain tingkat pengangguran perempuan di Afrika Selatan mencapai sekitar 35.9%. Lulusan perempuan menghadapi tingkat pengangguran sebesar 15.0% dan perempuan tanpa sertifikat kelulusan sekolah menengah atas sebesar 42.8%. Banyak perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah atau semi-terampil (Statistics South Africa, 2025a).

Namun mekanisme kerentanan ini tidak terbatas pada perempuan. Kelompok-kelompok lain yang berada dalam posisi struktural serupa juga menghadapi tingkat risiko yang tinggi. Baik laporan Afrika Selatan maupun World Bank menyoroti bahwa pekerjaan informal dan pengangguran hingga kemiskinan sebagian besar ditemukan di kalangan kelompok dengan tingkat pendidikan rendah dan di daerah pedesaan (Statistics South Africa, 2024b, 2025c, 2026; Sulla et al., 2022). Kondisi-kondisi ini menghasilkan tingkat akses yang berbeda-beda terhadap perlindungan sosial dan keamanan ekonomi. Kondisi-kondisi ini juga terkait dengan berbagai jenis perlindungan sosial yang umumnya terhubung dengan pasar tenaga kerja formal. Pada kuartal keempat tahun 2025 sekitar 33,5% pekerja Afrika Selatan berada dalam pekerjaan informal tanpa perlindungan dasar seperti cuti sakit dan pensiun atau kontrak kerja (Statistics South Africa, 2026). Selain itu warga Afrika Selatan berkulit hitam memiliki tingkat pengangguran sekitar 36,9% (Statistics South Africa, 2024b). Selain itu warga Afrika Selatan berusia 15 hingga 24 tahun memiliki tingkat pengangguran tertinggi yakni sekitar 57,0% pada kuartal keempat tahun 2022 dan juga paling mungkin bekerja di sektor informal. Porsi pekerjaan informal pada kelompok usia ini merupakan yang tertinggi di antara semua kelompok usia, yaitu 50,5 persen dari total lapangan kerja (Statistics South Africa, 2026).

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa ketidakamanan yang terus berlanjut di Afrika Selatan bukan hanya disebabkan oleh tingginya tingkat kekerasan dan kemiskinan atau pengangguran. Tetapi juga oleh ketidaksetaraan struktural yang menyebabkan distribusi sumber daya dan perlindungan yang tidak merata. Melalui *Beijing Platform for Action* (BPfA) negara telah menetapkan sejumlah

peraturan, lembaga dan mekanisme perlindungan. Namun instrumen-instrumen ini belum sepenuhnya menghilangkan perbedaan kapasitas perlindungan di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Ketidaksetaraan spasial dan ekonomi hingga sosial yang diwarisi dari kekerasan struktural masih menentukan siapa yang memiliki akses lebih baik terhadap lapangan kerja dan pendapatan. Hal itu juga berkaitan dengan pengaruh pada layanan publik dan perlindungan hingga siapa yang menghadapi ancaman ganda. Oleh karena itu dalam konteks keamanan manusia dan khususnya keamanan pribadi maka *personal security* bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga pelindung serta distribusi akses yang adil terhadap perlindungan tersebut. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketidakamanan merupakan kondisi yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi secara struktural. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan keamanan manusia tidak hanya harus berfokus pada penguatan lembaga. Namun pula pada penanganan ketidaksetaraan yang membatasi akses masyarakat terhadap perlindungan itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan hingga bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai lembaga dan sumber referensi yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alkire, S. (2003). *A Conceptual Framework for Human Security*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/002234336900600301>

Gibbs, A., Dunkle, K., Ramsommar, L., Willan, S., Shai, N. J., Chatterji, S., Naved, R., & Jewkes, R. (2020). New Learnings on Drivers of Men's Physical and/or Sexual Violence Against Their Female Partners, and Women's Experiences of This, and the Implications for Prevention Interventions. *Glob Health Action*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/DOI:10.1080/16549716.2020.1739845>

Government Gazette. (1998). *Employment Equity Act, 1998*. Government Gazette. <https://www.labour.gov.za/DocumentCenter/Acts/Employment%20Equity/Act%20-%20Employment%20Equity%201998.pdf>

Government Gazette. (2022). *Domestic Violence Amendment Act 14 of 2021*. Tersedia dalam South African Government: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202203/45824gen788.pdf diakses pada Sabtu, 7 Maret 2026

HSRC. (2025, November 21). *Violence Against Women in South Africa: Intersecting Vulnerabilities*. Human Sciences Research Council. Retrieved March 4, 2026, from <https://hsrc.ac.za/news/review/violence-against-women-in-south-africa-intersecting-vulnerabilities/>

Leburu-Masigo, G. (2020). Women and South Africa's Triple Challenge. *Social Work (South Africa)*, 56(2), 174–189. <https://doi.org/10.15270/56-2-819>

- Macassa, G., McGrath, C., Rashid, M., & Soares, J. (2021). Structural Violence and Health-Related Outcomes in Europe: A Descriptive Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 68–98. <https://doi.org/10.3390/ijerph18136998>
- Manysheva, K., Mestieri, M., & Schauer, J. (2025). *End of Apartheid, Not of Inequality: The Slow Transition in a Segregated Economy*. <https://cepr.org/publications/dp20472>
- Maphakela, M., Chuene, T. A., & Onya, H. (2026). Exploring the Socio-Economic Drivers of Gender-Based-Violence: A Closer Look at Community Dynamics in Rural Limpopo Province, South Africa. *Gender Issues*, 43(1). <https://doi.org/10.1007/s12147-025-09389-1>
- Meleshchuk, S., & Schauer, J. (2026). Spatial Inequality in South Africa: Causes and Policy Options. *International Monetary Fund*, 2026(018), 25–37. <https://doi.org/10.5089/9798229040006.018.A001>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis Second Edition* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications.
- South African Government. (1995). *Labour Relations Act 66 of 1995*. South African Government. <https://www.gov.za/documents/labour-relations-act>
- South African Government. (1997). *Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997*. South African Government. <https://www.gov.za/documents/basic-conditions-employment-act>
- South African Government. (2001). *Unemployment Insurance Act 63 of 2001*. South African Government. <https://www.gov.za/documents/unemployment-insurance-act>
- South African Government. (2007). *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act 32 of 2007*. Tersedia dalam Justice: <https://justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf> diakses pada Sabtu, 10 Januari 2026
- South African Government. (2018). *National Minimum Wage Act 9 of 2018*. South African Government. <https://www.gov.za/documents/acts/national-minimum-wage-act-9-2018-english-tshivenda-27-nov-2018>
- South African Government. (2020). *National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide (NSP-GBVF) 2020–2030*. Tersedia dalam South African Government: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202006/stratplan-gbvs.pdf diakses pada Sabtu, 7 Maret 2026
- Statistics South Africa. (2022). *Women Empowerment Gender Series Volume IX: 2017-2022*. Retrieved March 4, 2026, from <https://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-26/Report-03-10-262022.pdf>
- Statistics South Africa. (2024a). *National Poverty Lines*. <https://www.statssa.gov.za/publications/P03101/P031012024.pdf>
- Statistics South Africa. (2024b). *Quarterly Labour Force Survey (QLFS) Q1:2024*. <https://www.statssa.gov.za/publications/P0211/Presentation%20QLFS%20Q1%202024.pdf>
- Statistics South Africa. (2025a). *Gender Gaps Persist in South Africa's Labour Market*. <https://www.statssa.gov.za/?p=18668&utm>
- Statistics South Africa. (2025b). *Poverty Trends in South Africa An Examination of Absolute Poverty Between 2006 and 2023*. <https://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-06/Report-03-10-062023.pdf>
- Statistics South Africa. (2025c). *StatsSA releases General Household Survey 2024*. <https://www.gov.za/news/media->

- statements/statssa-releases-general-household-survey-2024-27-may-2025?utm
- Statistics South Africa. (2026). *How informality Shapes South Africa's Employment Landscape*. <https://www.statssa.gov.za/?p=19240&utm>
- Sulla, V., & Zikhali, P. (2018). *Overcoming Poverty and Inequality in South Africa: An Assessment of Drivers, Constraints and Opportunities*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/530481521735906534>
- Sulla, V., Zikhali, P., & Cuevas, P. F. (2022). *Inequality in Southern Africa: An Assessment of the Southern African Customs Union*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099125303072236903>
- The DoJ & CD. (2022, January 28). *New Acts Related to GBV Signed Into Law*. Department of Justice and Constitutional Development. <https://www.justice.gov.za/docs/articles/20220201-New-GBV-Acts-Signed.html>
- UN Sustainable Development Group. (2025, March 7). *The Beijing Declaration and Platform for Action at 30, and why that matters for gender equality*. UN Sustainable Development Group. <https://unsdg.un.org/latest/stories/beijing-declaration-and-platform-action-30-and-why-matters-gender-equality>
- UN Women. (2023, December 4). *South African Women's Group Trains Police to Respond to Gender-Based Violence*. UN Women. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/12/south-african-womens-group-trains-police-to-respond-to-gender-based-violence>
- UNDP. (1994a). *Human Development Report 1994*. UNDP. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- UNDP. (1994b). *Human development report 1994*. Oxford University Press for the United Nations Development Programme (UNDP). <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostats.pdf>
- UNDP. (2014). *Evolution of Thinking and Research on Human and Personal Security 1994-2013*. UNDP (United Nations Development Programme). <https://hdr.undp.org/content/evolution-thinking-and-research-human-and-personal-security-1994-2013>
- UNHCR. (2026). *Gender-based violence*. United Nations High Commissioner for Refugees . Retrieved March 4, 2026, from <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>
- United Nations. (1995, September 15). *Beijing Declaration and Platform for Action*. United Nations. Retrieved March 4, 2026, from <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>
- WHO. (2024a, March 25). *Violence against women*. World Health Organization. Retrieved March 4, 2026, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- WHO. (2024b, June 19). *Injuries and Violence*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence>
- World Bank. (2022). *Inequality in Southern Africa: An Assessment of the Southern African Customs Union*. In *World Bank*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099125003072240961/pdf/P1649270b73f1f0b5093fb0e644d33bc6f1.pdf>